



**MAHKAMAH
KONSTITUSI**



**DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

Dr. Fajar Laksono Suroso
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

KEWENANGAN MK

1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4

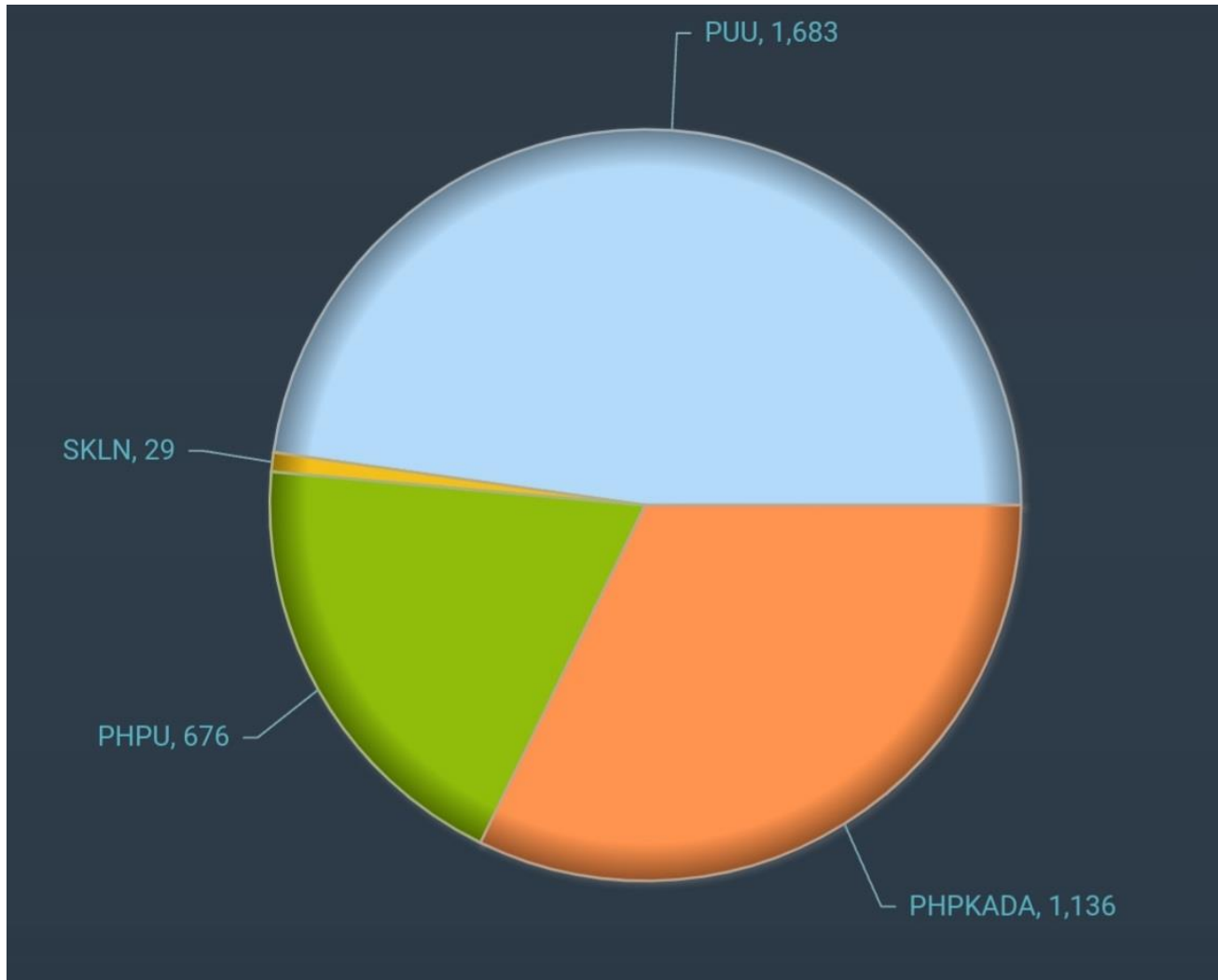
MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5

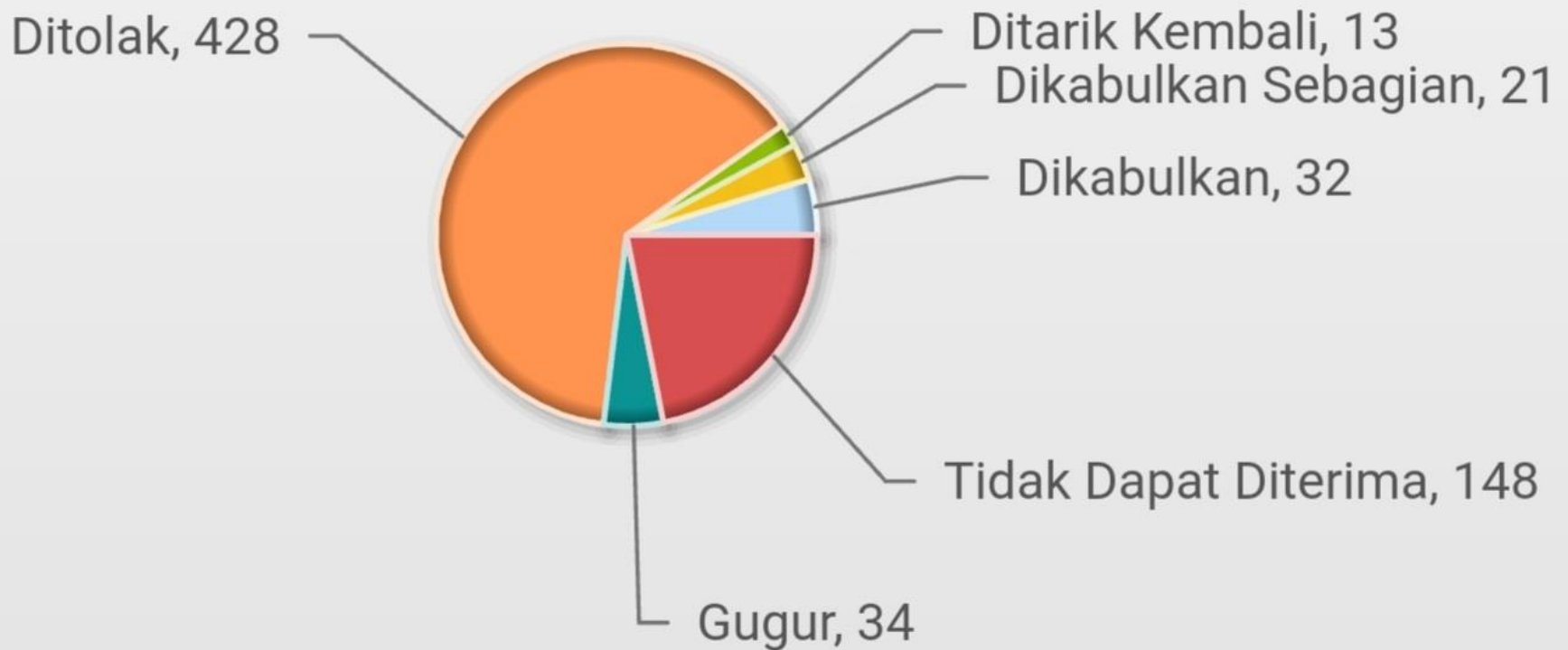
MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

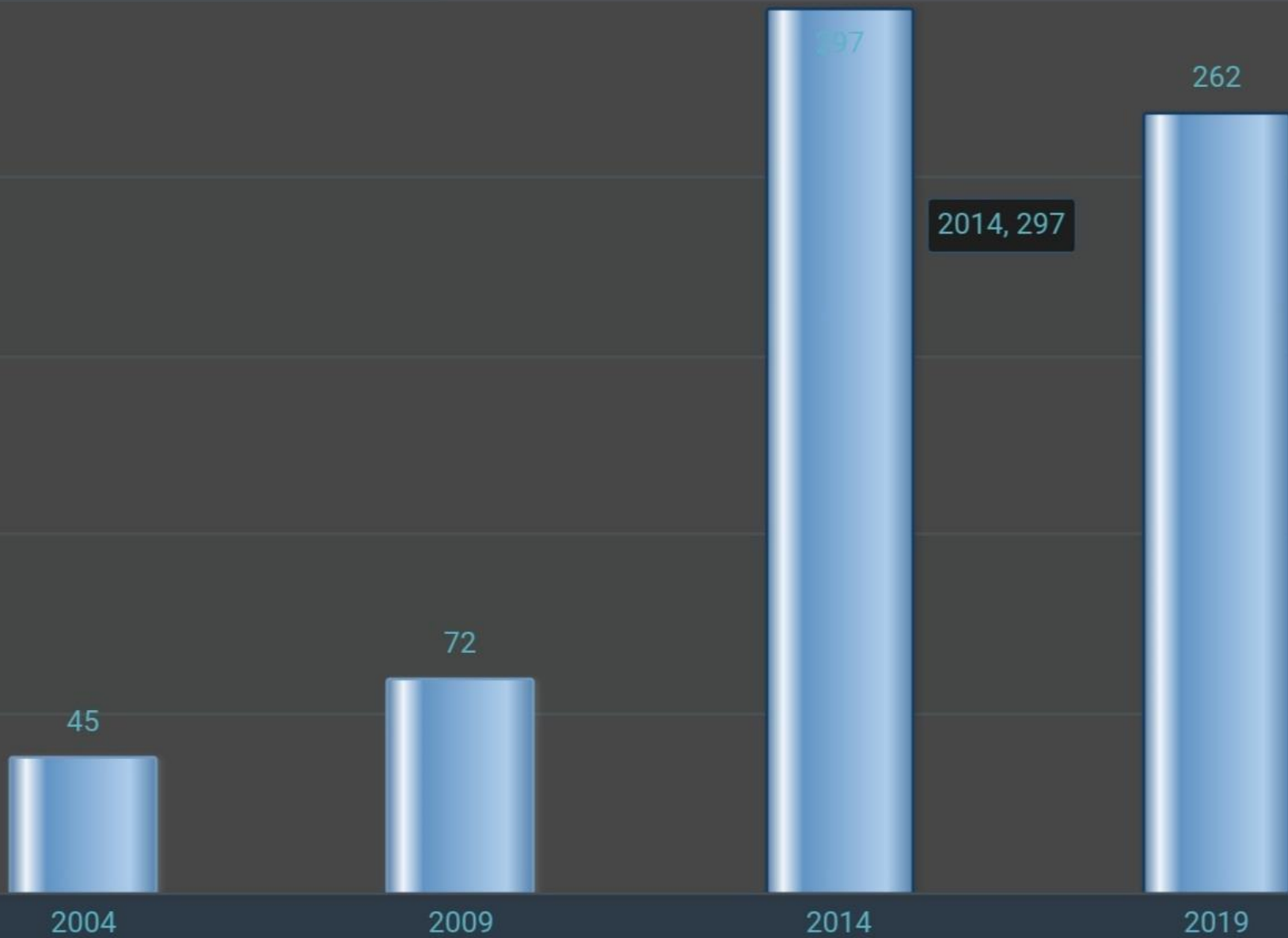
JUMLAH PUTUSAN (3524)

(per 14 September 2023)



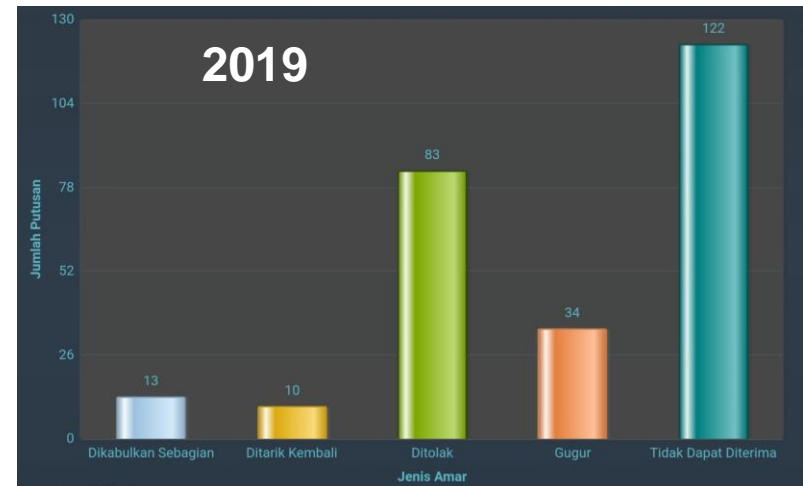
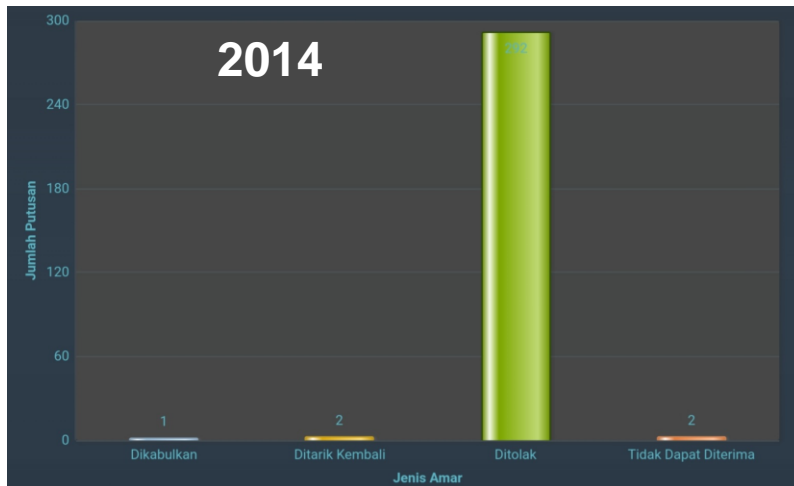
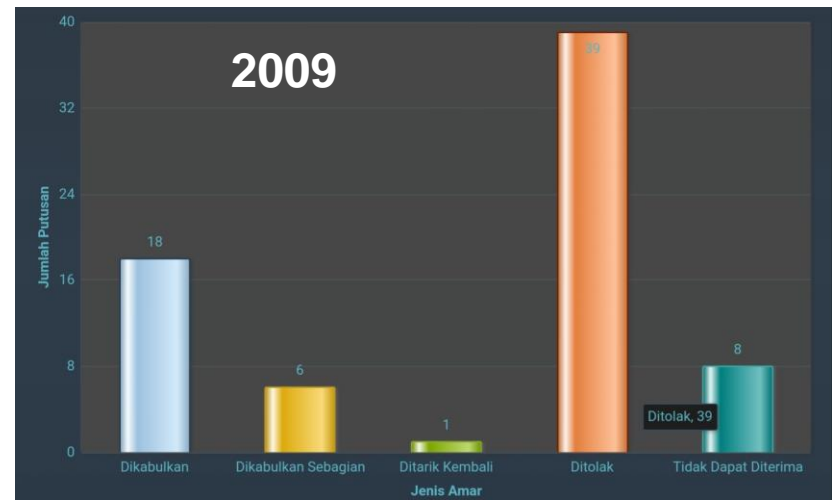
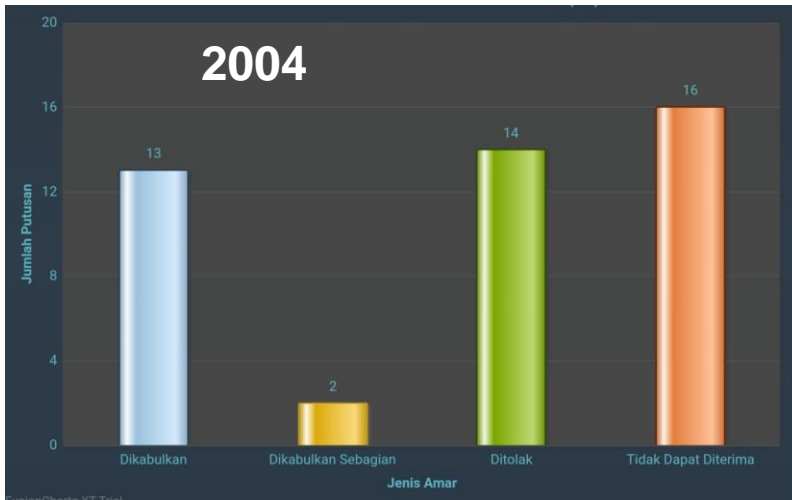
PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD





JUMLAH PUTUSAN PHPU PER PEMILU

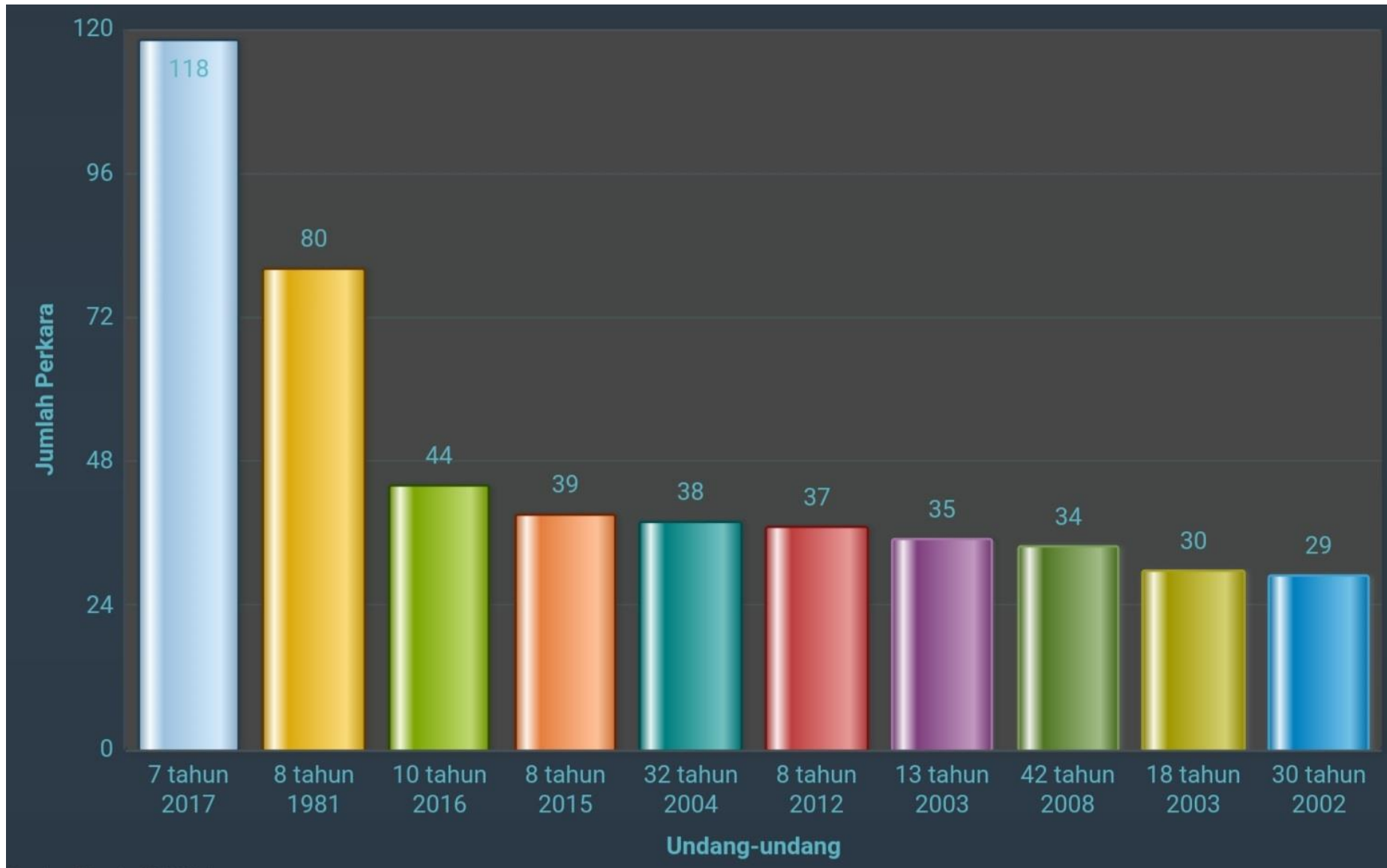
AMAR PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU



PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU

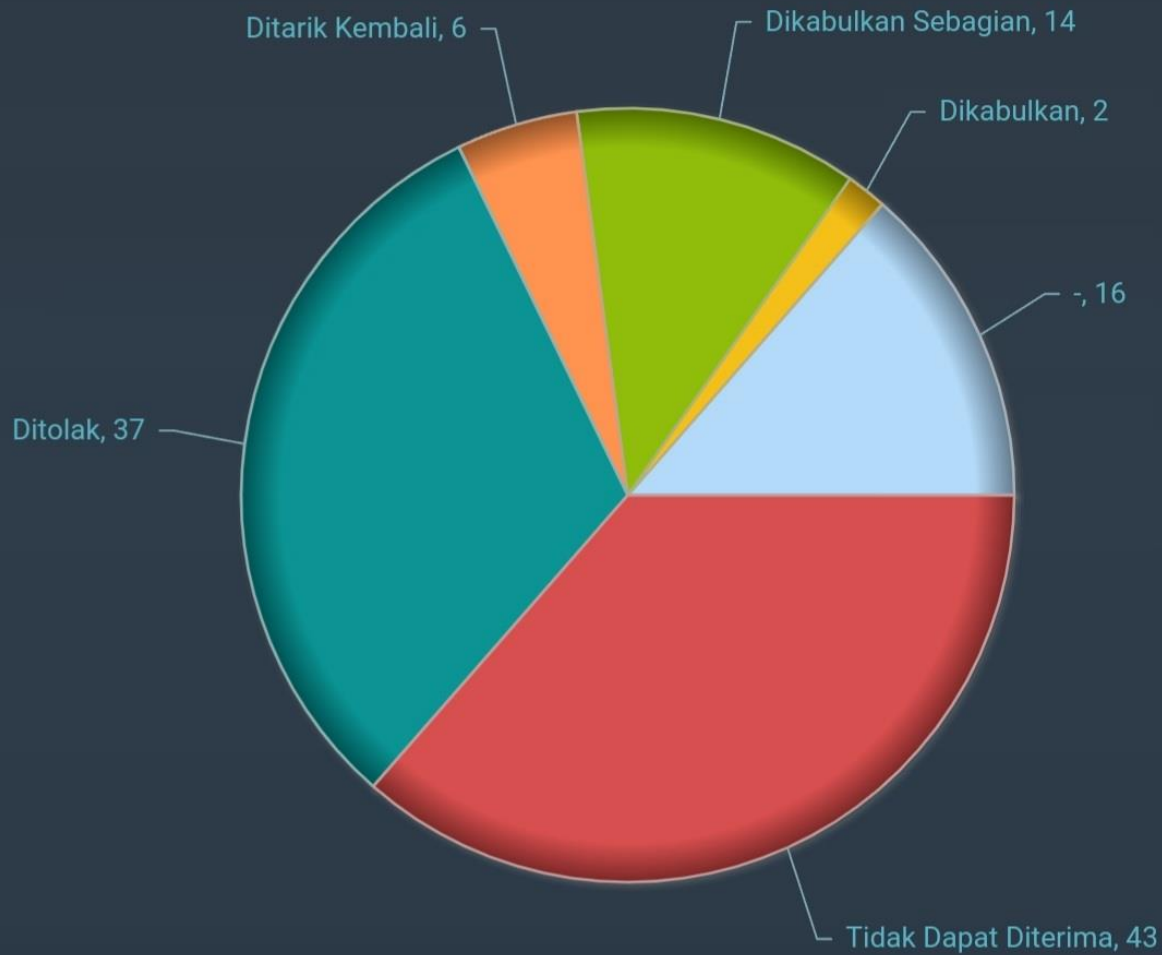
Tahun	Pemohon	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	45	15	13	16	0	0
2009	42	72	24	37	8	1	0
2014	14	297	1	291	2	2	0
2019	20	262	13	82	122	10	34

10 UU PALING SERING DIUJI



AMAR PUTUSAN 118 PUU PEMILU

Chart Berdasarkan Amar Putusan (118)



7 NORMA DALAM UU PEMILU PALING SERING DIUJI (DARI 206 NORMA YANG PERNAH DIUJI DI MK)

No.	Pasal	Ayat	Huruf	Angka	Jumlah Pengujian
1	222				32
2	169		huruf q		12
3	173	(1)			8
4	169		huruf n		5
5	173	(3)			4
6	414	(1)			4
7	227		huruf i		3

PERUBAHAN *LEGAL POLICY* UU PEMILU OLEH MK MELALUI *JUDICIAL REVIEW*

DUA PUTUSAN DIKABULKAN

1. Putusan Nomor [30/PUU-XVI/2018](#) (Pengurus Parpol Tak Boleh Jadi Calon Anggota DPD)
2. Putusan Nomor [39/PUU-XVII/2019](#) (Sebaran Perolehan Suara Capres)

EMPAT BELAS PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN

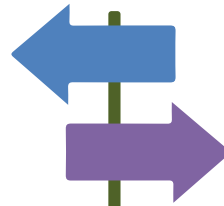
1. Putusan Nomor [53/PUU-XV/2017](#) (Parpol Ditetapkan/Verifikasi oleh KPU)
2. Putusan Nomor [61/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
3. Putusan Nomor [66/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
4. Putusan Nomor [31/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU dan PPK)
5. Putusan Nomor [38/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota)
6. Putusan Nomor [20/PUU-XVII/2019](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
7. Putusan Nomor [55/PUU-XVIII/2020](#) (Verifikasi Partai Politik)

- Putusan Nomor [32/PUU-XIX/2021](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
- Putusan Nomor [68/PUU-XX/2022](#) (Pejabat Negara, termasuk Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri)
- Putusan Nomor [80/PUU-XX/2022](#) (Pembentukan Dapil Kewenangan KPU)
- Putusan Nomor [87/PUU-XX/2022](#) (Syarat Kumulatif bagi Mantan Terpidana yang Menjadi Caleg)
- Putusan Nomor [12/PUU-XXI/2023](#) (Syarat bagi Mantan Terpidana untuk Menjadi Calon Anggota DPD)
- Putusan Nomor [31/PUU-XXI/2023](#) (Jangka Waktu Pengajuan Permohonan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilpres)
- Putusan Nomor [65/PUU-XXI/2023](#) (Kampanye di Fasilitas Pemerintah atau Pendidikan)

PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PPHU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM UNTUK
MENEGAKKAN DEMOKRASI BERDASAR
KONSTITUSI

MENILAI PROSES YANG DIPERSENGKETAKAN
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA HASIL
PEMILU

PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

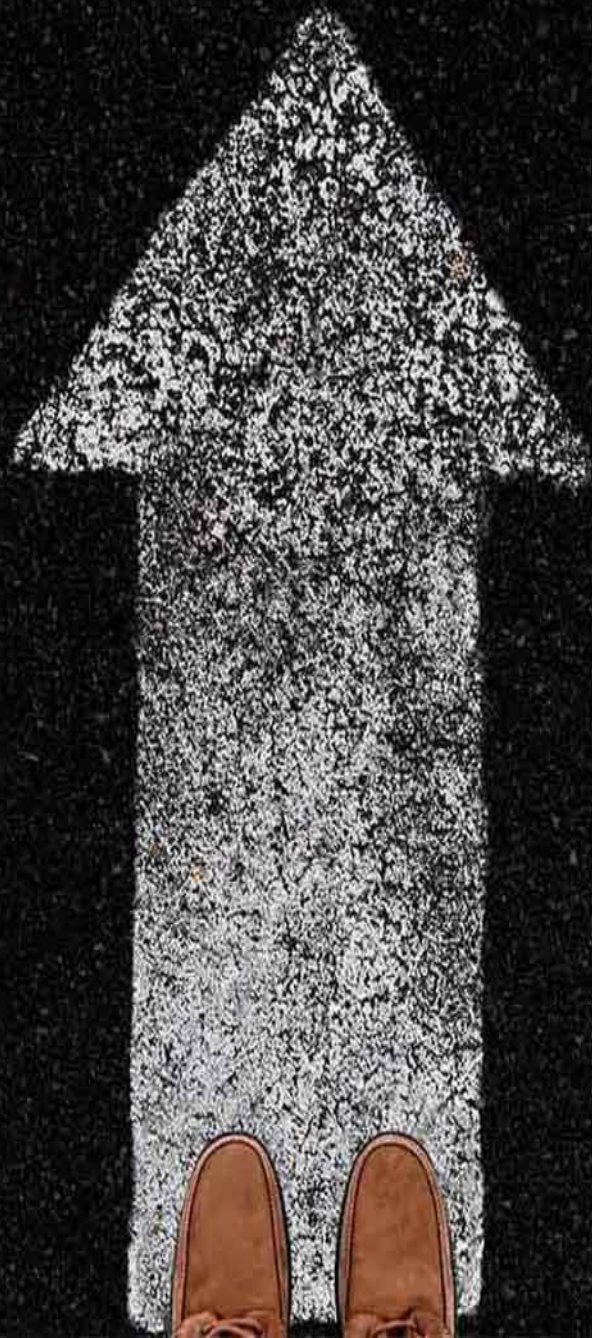
MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON





TERIMA KASIH